

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada unit organisasi di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak, apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan;
 - d. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - e. menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
PENETAPAN PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Maret 2017

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA
UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Estu Retno Yulianti, S.E. NIP. 19810725 201502 2 001 Calon Auditor	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Inspektorat
2.	Nicke Kusuma Devi, S.E. NIP. 19861001 201012 2 001 Kepala Subbagian Organisasi	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Yan Ari Wibowo, A.Md. NIP. 19900107 201502 1 001 Pranata Barang dan Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Umum dan Keuangan
4.	Resa Anggriani, S.Psi NIP. 19860709 201012 2 001 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
5.	Desi Kartika, S.H. NIP. 19891212 201211 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.	Anastasia Citra Puspita, S.E. NIP. 19850528 201012 2 001 Kepala Seksi Kemitraan Non Infrastruktur	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Meylina Putri Fabisari, S.T. NIP. 19840531 201502 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
8.	Eva Nurdinna Agustini, S.T. NIP. 19800816 201012 2 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

9.	Lulu Haryani, S.T. NIP. 19870423 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Mohamad Irvan Faradian, S.T. NIP. 19870214 201012 1 001 Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
11.	Anatasia, S.Psi., M.M. NIP. 19881217 201012 2 001 Kepala Seksi Tata Kelola Pengelola Pengadaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
12.	Rizky Arimawati, S.E. NIP. 19890325 201402 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
13.	Mia Adhi Paramitha, S.E. NIP. 19840127 201012 2 001 Kepala Seksi Evaluasi dan Survailen	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Linda Mikowati, S.TP. NIP. 19870726 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sangguh Wilayah I
15.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, S.E. NIP. 19821101 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Sulawesi	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sangguh Wilayah II
16.	Febri Kamalisa Rachman, S.H. NIP. 19840208 201502 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA